

BAB IV

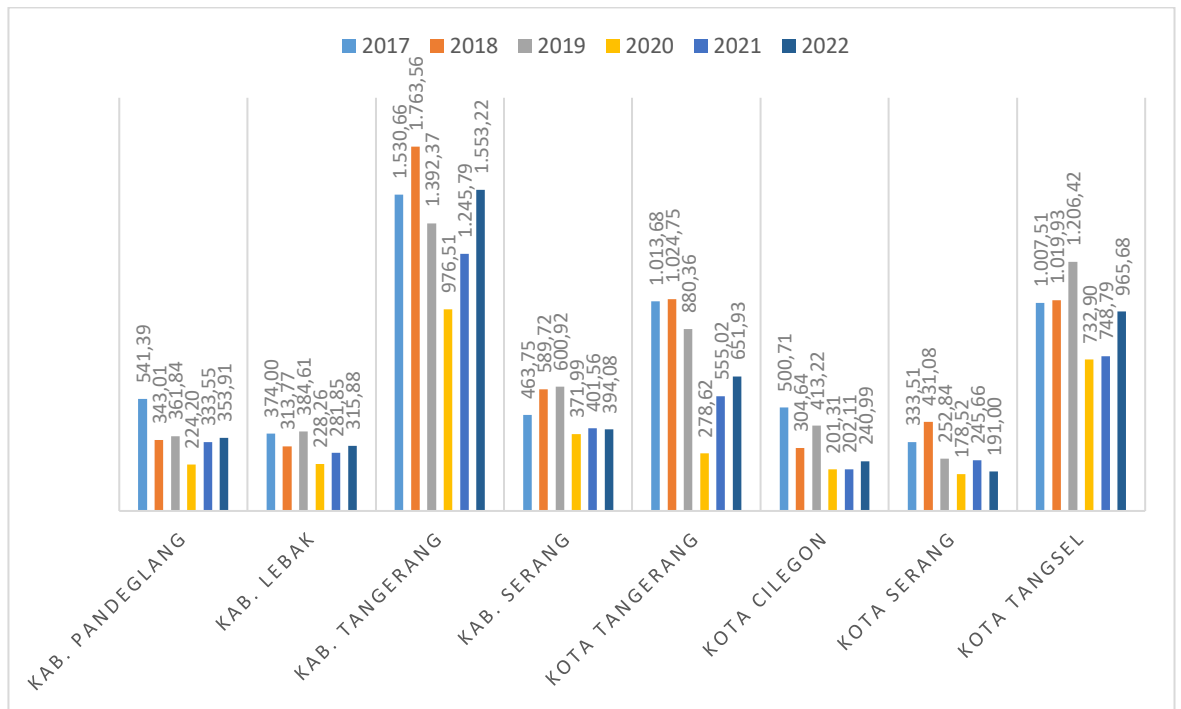
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Untuk mengetahui bagaimana gambaran variabel yang dipakai dalam suatu penelitian, maka perlu dilakukan gambaran umum. Variabel yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel dependen yaitu belanja modal dan variabel independennya yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan cakupan wilayah yang terdapat di 4 Kabupaten diantaranya Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang serta 4 Kota diantaranya Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

4.1.1. Perkembangan Belanja Modal

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal. Berikut ini merupakan data perkembangan belanja modal di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

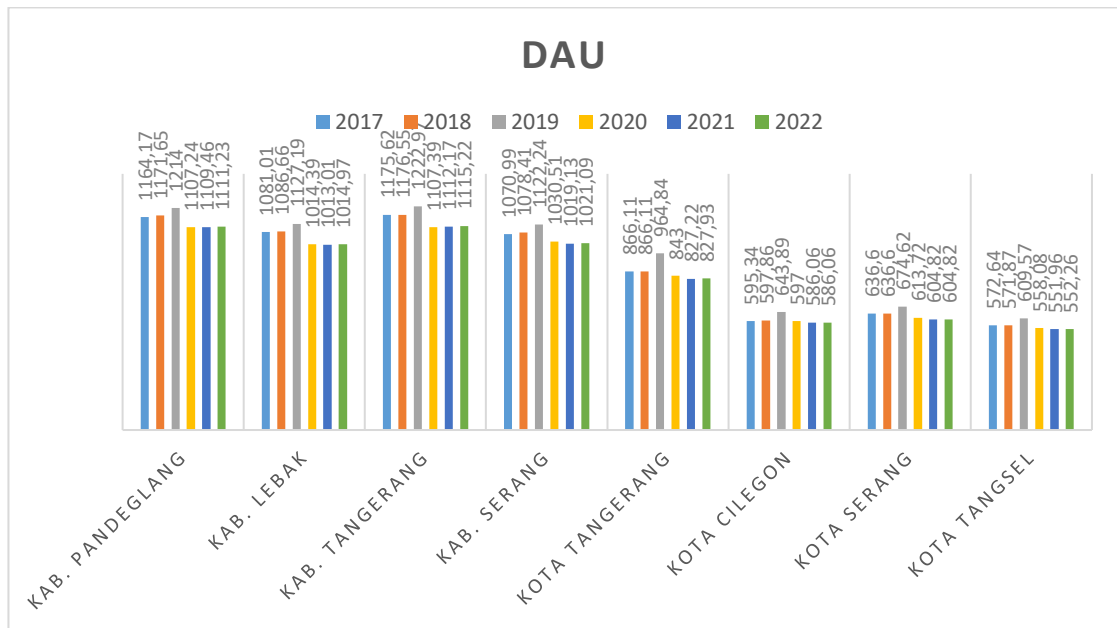
Gambar 4. 1 Perkembangan belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.1 menunjukkan perkembangan belanja modal pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dimana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa angka belanja modal secara keseluruhan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 – 2022 Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang pengeluaran belanja modal paling tinggi se Provinsi Banten. Belanja modal di Kabupaten Tangerang semakin meningkat seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, dan berbagai program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibanding daerah yang lain di

Provinsi Banten. Hal tersebut sesuai dengan nilai pengeluaran belanja modalnya cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain, dimana nilai belanja modal Kabupaten Tangerang tertinggi terjadi pada tahun sebesar 1763,56 Milyar Rupiah. Sedangkan Kota Serang menjadi daerah yang belanja modal terendah di Provinsi Banten pada tahun 2020, yaitu sebesar 178,52 Milyar Rupiah. Hal ini dikarenakan penyebab dari fenomena covid-19 yang menyebabkan kurangnya optimalisasi belanja modal seperti pembangunan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan publik yang mengakibatkan kurangnya investor di Kota Serang.

4.1.2. Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menjadi salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Alokasi Umum di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

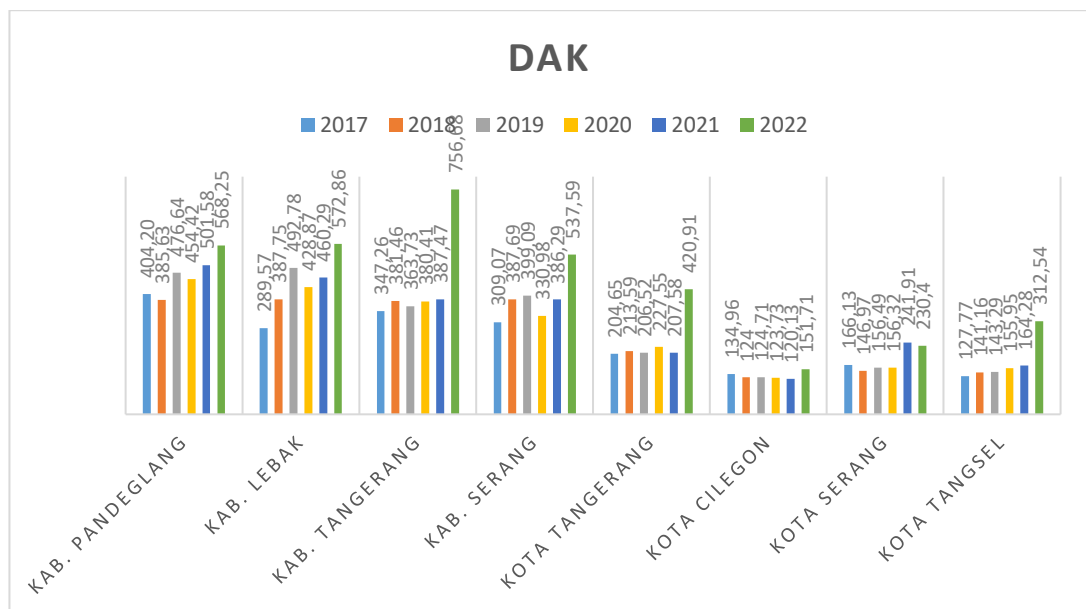
Pada gambar 4.2 menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa anggaran DAU lebih banyak realisasinya pada daerah Kabupaten dibanding daerah Kota. Karena menurut definisi, DAU digunakan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dimana wilayah kabupaten lebih banyak mendapatkan realisasi DAU demi mengatasi kesenjangan fiskalnya.

Menurut Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten (2021), kontribusi terbesar dari pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu berasal dari DAU. Besarnya DAU yang ditransfer ke daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi. Besarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK.

4.1.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Berikutnya yang menjadi variabel independent penelitian ini ialah Dana Alokasi Khusus. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Alokasi Khusus di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

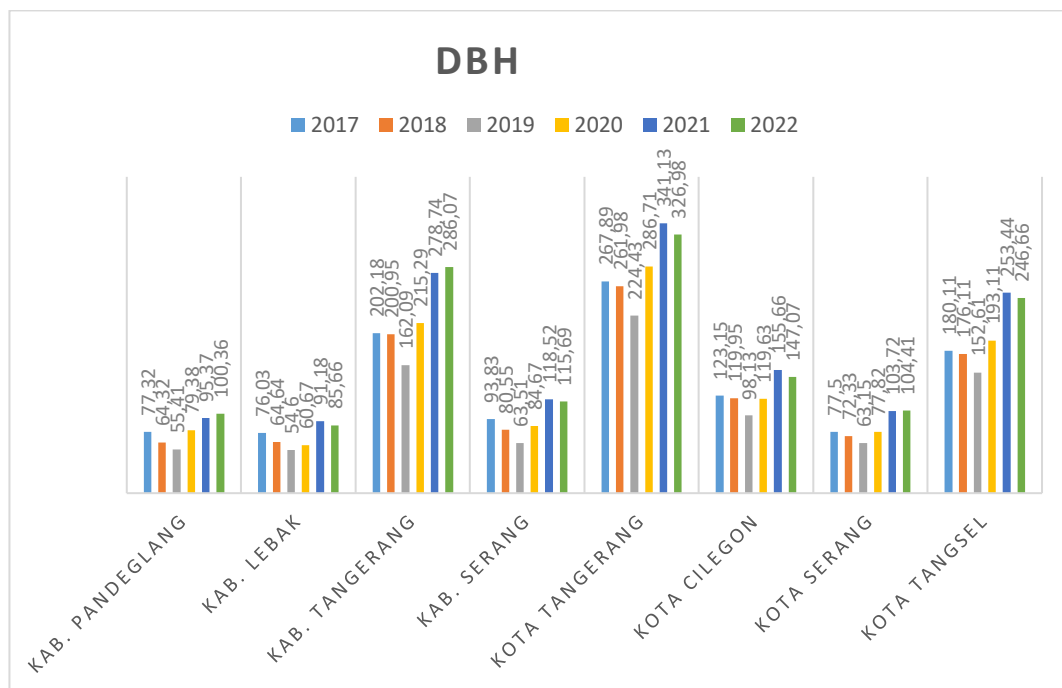
Gambar 4. 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.3 menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Khusus pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa terjadi tren fluktuatif pada wilayah kabupaten dan cenderung

stabil pada wilayah kota. Selama periode 2017 sampai dengan 2022, rata-rata DAK tertinggi terdapat pada Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut membuahkan hasil pada tahun 2022 dimana PemKab Pandeglang meraih penghargaan realisasi Dana Alokasi Khusus fisik tercepat tahun 2022.

4.1.4. Perkembangan Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil juga merupakan salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Dana Bagi Hasil di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



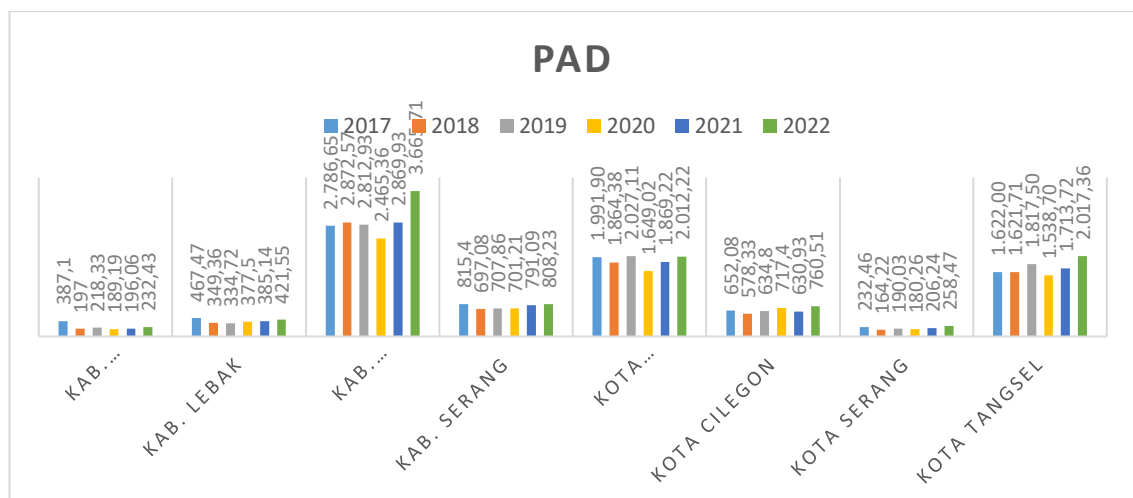
Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 4 Perkembangan Dana Bagi Hasil pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.4 menunjukkan perkembangan Dana Bagi Hasil pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan terjadi tren yang fluktuatif dan polanya hampir sama pada setiap kabupaten/kota. Namun Dana Bagi Hasil yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 terutama di Kota Tangerang sebesar 341 milyar.

4.1.5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya pemerintah daerah untuk pembiayaan pelayanan publiknya. Maka dari itu PAD menjadi salah satu variabel independent dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah di 8 Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Data dalam penelitian diambil dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan diolah dalam bentuk grafik yang dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: DJPK (data diolah)

Gambar 4. 5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)

Pada gambar 4.5 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022. Yang mana menunjukkan bahwa PAD tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Tangerang. Dapat dilihat ketimpangannya sangat signifikan jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jumlah industri yang dibangun dan memproduksi secara aktif di Kabupaten Tangerang.

Menurut Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten (2021) jika dilihat dari pendapatan daerah, realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi salah satunya pada tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan realisasi pendapatan daerah terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 14,19%.

4.2 Hasil Analisis dan Estimasi Model Regresi Data Panel

4.2.1. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan metode Panel data yaitu gabungan dari runtun waktu (Time Series) dan runtun wilayah (Cross Section). Pada penelitian ini dimana data runtun waktu atau Time Series yang digunakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan data runtun wilayah atau Cross Section yaitu pada 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang serta 4 (empat) kota yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ialah bagaimana

pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 8 Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan model berikut :

$$BM_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

Keterangan :

BM	: Belanja Modal (Ribu Rupiah)
DAU	: Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (Ribu Rupiah)
DBH	: Dana Bagi Hasil (Ribu Rupiah)
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)
β_0	: Intersep ; Nilai Y Ketika X = 0 (harga konstan)
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: Koefisien regresi masing-masing variabel independent
ε	: eror
t	: waktu

4.2.2. Hasil Pengujian Pemilihan Model

Arah dari pengujian ini yaitu untuk menentukan model terbaik dalam estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Permodelan dengan Teknik analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan alternatif dalam pengolahannya yang terdiri dari model OLS Pooled atau *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

4.2.2.1 Hasil Uji Chow

Uji yang digunakan kali ini untuk tahu model manakah yang dipilih antara model CEM atau FEM menggunakan Uji *Restricted F-test* atau *Chow-Test*. Dengan menggunakan hipotesis yaitu:

$$H_0 : \rho_{\text{value}} > \alpha \text{ Model Common Effect}$$

$$H_1 : \rho_{\text{value}} < \alpha \text{ Model Fixed Effect}$$

Ukuran yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada Uji Chow yaitu Ketika nilai probabilitas *Chi-Square* $\leq 0,05$ maka sebaiknya memilih model Fixed Effect. Tetapi Ketika nilai probabilitas *Chi-Square* $\geq 0,05$ maka model yang dipilih yaitu *Common Effect*.

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2,790816	(7,36)	0,0199
<i>Cross-section Chi-square</i>	20,808351	7	0,0041

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Jika dilihat dari hasil uji diatas menunjukkan dimana nilai Prob. *Cross-section Chi Square* $< \alpha$ atau $0,0041 < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan tolak H_0 yang artinya model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

4.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Selanjutnya dilakukan pengujian Hausman guna mengetahui manakah model yang terbaik yang harus dipakai diantara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Dengan hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{\text{value}} > \alpha$ Model *Random Effect*

$H_1 : \rho_{\text{value}} < \alpha$ Model *Fixed Effect*

Dalam Uji Hausman, jika hasil dari uji mendapatkan nilai *Prob. Cross-Section Random* < 0,05 maka model yang dipakai yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), dan apabila nilai *Prob. Cross-Section Random* > 0,05 maka model yang dipakai yaitu *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	5,686178	4	0,2238

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan dimana nilai *Prob. Cross-Section Random* > α atau $0,2238 > \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan tolak H_1 yang artinya model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Sehingga dari hasil pengujian dalam pemilihan model terbaik yaitu Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, dapat disimpulkan model estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

4.2.3. Hasil Estimasi Model

Estimasi hubungan antar variabel yang mempengaruhi Belanja Modal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* pada program Eviews, didapatkan hasil model persamaan regresi data panel sebagai berikut.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Panel Data

Variabel	Koefisien
C	4,09E+08
DAU	-0,008317
DAK	-0,164531
DBH	-2,922406
PAD	0,613875

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Berdasarkan hasil estimasi diatas, diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$BM_t = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.2)$$

$$BM_t = 409.000.000 - 0,008317 DAU_t - 0,164531 DAK_t - 2,922406 DBH_t + 0,613875 PAD_t + \varepsilon_t \quad (4.3)$$

Interpretasi dari hasil estimasi diatas yaitu:

1. Konstanta

Berdasarkan hasil estimasi diketahui koefisien konstanta yaitu 409.000.000, artinya ketika Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah konstan maka Belanja Modal adalah sebesar 409.000.000.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar -0,008317, artinya peningkatan DAU sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.8,31 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar -0,164531, artinya peningkatan DAK sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.164,53 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Dana Bagi Hasil sebesar -2,922406, artinya peningkatan DBH sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.2.922,4 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

5. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,613875, artinya peningkatan PAD sebesar Rp.1.000,- akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp.613,87 dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4.2.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian statistik yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Hal ini dilakukan agar dapat melihat apakah data tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik ini penting dilakukan dalam menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan

varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator* – BLUE), yang artinya model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu perlu adanya bukti lebih lanjut apakah model regresi yang digunakan dapat memenuhi asumsi tersebut.

4.2.5.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi pada analisis statistik adalah data terdistribusi normal. Uji Normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui nilai sebaran pada data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data tersebut apakah terdistribusi normal dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera ialah uji statistic dalam mengetahui apakah data berdistribusi normal. Untuk mengidentifikasi uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat uji statistic Jarque-Bera Test (J-B Test) dan Probability. Dengan pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

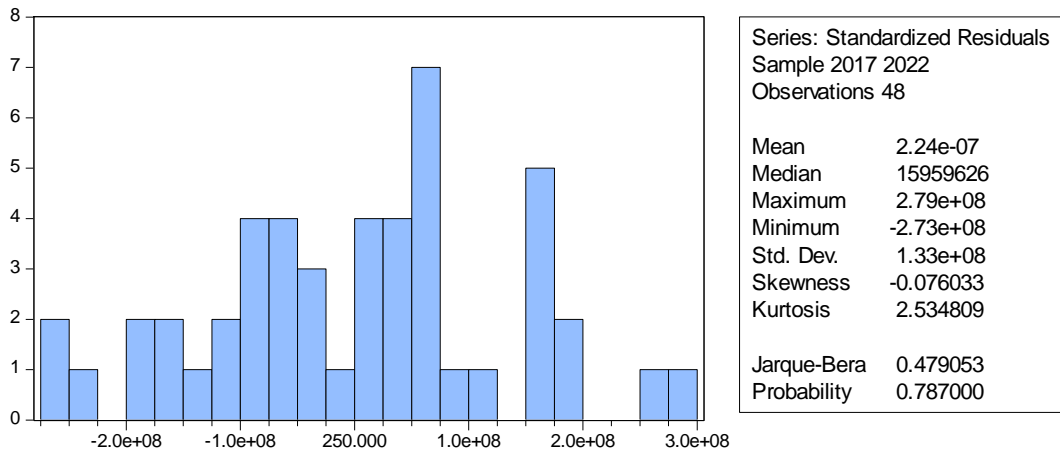
H_0 : Data tidak terdistribusi normal

H_1 : Data terdistribusi normal

Pengujian dapat dilihat dengan dua cara, yaitu:

1. Ketika nilai $JB < \text{Chi-Square tabel}$ maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi $JB > \text{Chi-Square}$ maka data tidak terdistribusi normal.
2. Ketika $\text{Probability} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data terdistribusi normal. Namun jika yang terjadi $\text{Probability} < \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka data tidak terdistribusi normal.

Berikut ini hasil pengolahan uji normalitas dari seluruh variabel yang diteliti :



Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pada gambar 4.7 hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa besaran nilai Jarque-bera yaitu 0.479053 yang mana jika nilai $JB < \chi^2$ tabel dan nilai prob. JB (P-Value) $> \alpha$ maka data terdistribusi normal. Nilai JB (0.479053) $< (59.303512)$ χ^2 tabel dan prob. (0.787000) $> (0,05)$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut Tolak H_0 yang mana artinya data terdistribusi normal.

4.2.5.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi dimana adanya hubungan linier antar variabel independent. Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinearitas maka digunakan nilai *correlation matrix* dari semua variabel independent. Nilai *correlation matrix* harus kurang dari 0,8 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *correlation matrix* ada yang bernilai negatif, hal tersebut

tidak berpengaruh karena yang diperhatikan tetap angkanya. Pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

H_0 : Terjadi Multikolinearitas

H_1 : Tidak terjadi Multikolinearitas

Berikut ini uji multikolinearitas menggunakan correlation matrix:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	DAU	DAK	DBH	PAD
DAU	1.000000	0.794486	-0.151872	0.122613
DAK	0.794486	1.000000	-0.095728	0.081838
DBH	-0.151872	-0.095728	1.000000	0.823774
PAD	0.122613	0.081838	0.823774	1.000000

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 , dinyatakan bahwa tidak tolak H_0 dimana nilai matriks korelasi menunjukkan masih terdapat nilai korelasi $> 0,8$. Maka dalam hasil ini masih terdapat masalah asumsi klasik multikolinearitas. Oleh sebab itu, sebagai solusinya adalah menggunakan metode diferensiasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Diferensiasi

	D(DAU)	D(DAK)	D(DBH)	D(PAD)
D(DAU)	1.000000	0.222976	-0.630005	0.348226
D(DAK)	0.222976	1.000000	-0.165219	0.510921
D(DBH)	-0.630005	-0.165219	1.000000	-0.089825
D(PAD)	0.348226	0.510921	-0.089825	1.000000

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Setelah melakukan diferensiasi didapatkan hasil yang menunjukkan nilai korelasi $< 0,8$ maka hasil tersebut menyatakan Tolak H_0 yang artinya data lolos dari uji asumsi klasik multikolinearitas.

4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan guna mengetahui apakah varians dari residual observasi satu dengan yang lainnya adalah sama. Sehingga, regresi dianggap baik jika lolos atau tanpa heteroskedastisitas. Salah satunya yaitu melalui uji white (*white test*). Dalam persamaan regresi diperlukan pengujian, Ketika homokedastisitas maka varian yang dimiliki mempunyai residual yang sama, sedangkan sebaliknya pada heterikedastisitas maka varian yang dimiliki berbeda-beda (Gujarati & Porter, 2012).

H_0 : Terjadi Heteroskedastisitas

H_1 : Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Standar pengujian untuk hasil pengolahan data yaitu:

- 1) Apabila tidak terjadi heteroskedastisitas ketika *Chi-square* hitung $<$ *Chi-square* tabel (H_0 ditolak).
- 2) Apabila terjadi heteroskedastisitas ketika *Chi-square* hitung $>$ *Chi-square* tabel (H_0 tidak ditolak).

Cara menghitung chi square hitung yaitu: $R^2 \times n$. Adapun R^2 diperoleh dari hasil Pool data dan “n” merupakan jumlah data per variabel.

Chi square tabel didapatkan dari rumus yang dihitung pada ms. Excel: $=CHIINV(0.05, n-k)$. k merupakan jumlah variabel dalam penelitian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Jumlah Data (n)	R-squared	Jumlah Variabel	Chisquare_{statistik} = (n x R-Squared)	Chi-Square_{table}	Hasil
48	0,834453	5	40,053744	59,303512	Tolak H_0

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dapat diketahui dari Chi Square hitung yaitu 40,053744 dan Chi Square tabel yaitu 59,303512. Dilihat dari hasil tersebut menyatakan bahwa Tolak H_0 yang dapat di katakan bahwa chi square hitung < chi square tabel maka data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.5.4 Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan metode Durbin Watson autokorelasi terdeteksi. Dari hasil pengujian Autokorelasi dengan nilai *Durbin Watson* akan berada pada kisaran 0 hingga 4 dimana $du < d < 4 - du$ maka dalam penelitian ini tidak terkena autokorelasi. Menurut Winarno (2017) apabila D-W berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut tidak ada terdapat autokolerasi. Sebaliknya, jika DW tersebut tidak berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut ada terdapat autokolerasi. Pernyataan hipotesis statistiknya yaitu:

H_0 : Terjadi Autokorelasi

H_1 : Tidak terjadi Autokorelasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Dw	Estimasi Pengujian
1,680721	$1,54 < 1,680721 < 2,46$

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Dari hasil regresi diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,680721 dan jika mengacu pada buku yang ditulis oleh Winarno (2017) nilai tersebut berada diantara 1,54 dan 2,46. Hasil pengolahan data diatas maka data tersebut Tolak H_0 yang artinya terbebas dari autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis Statistik

4.3.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T

Variabel	t-statistik	t-tabel	Prob	Keputusan
C	2,876510	2,016692	0,0062	
Dana Alokasi Umum (DAU)	-0,049759	2,016692	0,9605	Tidak Tolak H_0 , Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-0,802663	2,016692	0,4266	Tidak Tolak H_0 , Tidak Signifikan
Dana Bagi Hasil (DBH)	-5,156131	2,016692	0,0000	Tolak H_0 , Signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,07340	2,016692	0,0000	Tolak H_0 , Signifikan

Sumber : Pengolahan Data Eviews

a. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh antara DAU dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_1 \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh antara DAU dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-0,049759 < 2,016692$ T Tabel, Tidak tolak H_0 yang artinya tidak terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,9605 > 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU dengan Belanja Modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh DAK dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh DAK dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-0,802663 < 2,016692$ T Tabel, Tidak tolak H_0 yang artinya tidak terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,4266 > 0,05$ (Alpa) maka data tersebut tidak berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAK dengan Belanja Modal.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh DBH dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ terdapat pengaruh DBH dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $-5,156131 > 2,016692$ T Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,0000 < 0,05$ (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel DBH dengan Belanja Modal.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

$H_0 : \beta_3 = 0$ tidak terdapat pengaruh PAD dengan Belanja Modal

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ terdapat pengaruh PAD dengan Belanja Modal

Interpretasi:

T Hitung $12,07340 > 2,016692$ T Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,0000 < 0,05$ (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD dengan Belanja Modal.

4.3.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

$H_0 : \beta_0 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

$H_1 : \beta_0 \neq 0$ terdapat pengaruh variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F

F-Statistik	F-Tabel	Prob.	α	Keputusan
54,18606	5,710907	0,000000	0,05	Tolak H_0 , Signifikan

Sumber : Pengolahan Data Eviews

Interpretasi :

F hitung $54,18606 > 5,710907$ F Tabel, Tolak H_0 yang artinya terdapat pengaruh dan nilai “Sig” $0,0000 < 0,05$ (Alpa) maka data tersebut signifikan. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU, DAK, DBH dan PAD dengan Belanja Modal.

4.3.3 Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian untuk mengukur sebaik apa sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya (Gujarati & Porter, 2012). Nilai koefisien determinasi (*Goodness of fit*) mencerminkan seberapa besar variasi dari regressand (Y) dapat diterangkan oleh regressor (X). Koefisien determinasi berada diantara 0 sampai dengan 1. Jika R^2 bernilai kecil maka variabel bebas memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat. Begitu pula jika mendapatkan nilai mendekati 1 maka variabel bebas akan menyampaikan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memperkirakan perubahan pada variabel terikat.

H_0 : Model tidak BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

H_1 : Model BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Jika koefisien determinasi lebih dari 60% atau 0,60 berarti penelitian memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) tetapi jika koefisien determinasi kurang dari 60% atau 0,60 sehingga tidak dapat memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati & Porter, 2012).

Dari hasil uji Koefisien determinasi terdapat nilai R-squared sebesar 0,834453 yang mana menunjukkan hasil Tolak H_0 maka penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 83% Belanja Modal di pengaruhi oleh tingkat DAU, DAK, DBH dan PAD lalu sisanya sebesar 17% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian tersebut.

4.4 Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak ada pengaruh serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,9605 > 0,05$ (Alpa) dan nilai t-statistik sebesar $-0,049759 < 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar $-0,008317$, artinya peningkatan DAU sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.8,31. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan

atau penurunan Dana Alokasi Umum tidak begitu mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Rochmatullah et al. (2016), Purba et al. (2021), Pangaribuan et al. (2018), dan Sinaga (2021) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et al. (2021), Mundiroh (2019), Rahma & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal daerah.

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Pemerintah pusat atau daerah dapat memberlakukan ketentuan tertentu terkait penggunaan DAU. Jika ada pembatasan atau aturan yang mengarahkan DAU untuk digunakan pada kegiatan operasional atau pengeluaran

rutin, daripada belanja modal, maka DAU mungkin tidak secara langsung memengaruhi belanja modal. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas pengeluaran mereka. Jika pemerintah daerah memilih untuk mengalokasikan DAU untuk kegiatan atau program non-modal, maka DAU tidak akan berdampak langsung pada belanja modal. DAU cenderung digunakan untuk belanja rutin kegiatan pemerintah daerah dibanding untuk pembangunan infrastruktur (Rochmatullah et al., 2016). Karena belanja modal biasanya memerlukan perencanaan jangka panjang dan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah mungkin cenderung mengalihkan dana ke belanja operasional yang lebih mendesak. Teori efek flypaper menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung menghabiskan dana yang diterima dari pemerintah pusat (seperti DAU) untuk belanja yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, seperti belanja operasional, daripada belanja modal yang manfaatnya mungkin baru terasa dalam jangka panjang.

Berdasarkan pada teori keagenan, informasi tentang DAU dan DAK disampaikan sebelum pembahasan anggaran daerah yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislative (DPRD). Maka dana tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan dengan pertimbangan tertentu. DAU adalah salah satu sumber pendapatan yang relatif stabil bagi pemerintah daerah. Namun, ketidakpastian dalam penerimaan pendapatan lainnya, seperti pendapatan asli daerah (PAD) atau transfer dari pemerintah pusat lainnya, dapat membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam merencanakan belanja modal yang memerlukan komitmen dana yang besar di masa depan. Namun, sebagian dana

perimbangan yang lain dapat kemungkinan mengalami perubahan angka karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan riil yang terjadi (Pangaribuan, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,4266 > 0,05$ (α) dan nilai t-statistik sebesar $-0,802663 < 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar $-0,164531$, artinya peningkatan DAK sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.164,53. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan atau penurunan Dana Alokasi Khusus tidak begitu mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Purba et al. (2021), Pangaribuan et

al. (2018) yang menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et al. (2021), Sinaga (2021), Rahma & Riharjo (2019), Sudika & Budiarta (2017).

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan Pemda karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis (Pangaribuan, 2018).

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana pemerintah selaku pemegang kekuasaan. DAK sering kali diarahkan untuk proyek-proyek spesifik yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah mungkin menjadi terlalu bergantung pada DAK untuk proyek-proyek tersebut dan mengurangi inisiatif untuk menggunakan sumber daya sendiri atau dana lainnya untuk belanja modal. Ketika pemerintah daerah menerima DAK untuk proyek-proyek tertentu, mereka mungkin mengalihkan dana mereka sendiri yang seharusnya digunakan untuk belanja modal ke belanja operasional atau kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Ini bisa menyebabkan penurunan dalam total belanja modal meskipun ada tambahan dana dari DAK. Jika pemerintah daerah atau instansi penerima DAK mengalami ketidakmampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek-proyek belanja modal, maka DAK mungkin tidak akan

berdampak signifikan. Kurangnya kapasitas manajerial dapat menghambat efektivitas penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan pada teori keagenan, informasi tentang DAU dan DAK disampaikan sebelum pembahasan anggaran daerah yang dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislative (DPRD). Maka dana tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Namun, sebagian dana perimbangan yang lain dapat kemungkinan mengalami perubahan angka karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan riil yang terjadi (Pangaribuan, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil terdapat pengaruh dan signifikan serta mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) dan nilai t-statistik sebesar $-5,156131 > 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi pada model penelitian diketahui bahwa koefisien variabel Dana Bagi Hasil sebesar $-2,922406$, artinya peningkatan DBH sebesar Rp.1.000,- akan menurunkan Belanja Modal sebesar Rp.2.922,4. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi

peningkatan atau penurunan Dana Bagi Hasil mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Ishak et al. (2021), Rahma & Riharjo (2019) yang menyatakan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun tidak sejalan dengan studi empiris dari Mundiroh (2019).

Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam daerah. Dana bagi hasil merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan dengan mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal (Ishak et al., 2021).

Jika pemerintah memiliki fleksibilitas dalam alokasi anggaran, penurunan dana bagi hasil bisa mendorong mereka untuk memotong pengeluaran di area lain guna menyediakan dana untuk proyek-proyek belanja modal. Ini mungkin terjadi jika belanja modal dianggap sebagai prioritas strategis. Pemerintah juga tidak dapat bergantung pada dana bagi hasil sebagai sumber utama pendanaan, penurunan dana bagi hasil dapat mendorong pemda untuk mencari sumber dana alternatif. Ketika DBH meningkat, dana tambahan ini dapat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan jangka pendek seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, atau program-program sosial, alih-alih investasi jangka panjang. Dalam usaha untuk memperoleh

dana baru, pemda akan lebih mungkin untuk meningkatkan belanja modal dengan cara mengakses sumber dana yang lebih fleksibel atau lebih besar salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah yang mana hal tersebut dapat membawa pada Kemandirian Fiskal suatu daerah tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan.

4.4.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh dan signifikan serta mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (alpha) dan nilai t-statistik sebesar $12,07340 > 2,016692$ (t_{tabel}). Hasil estimasi diketahui bahwa koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,613875, artinya peningkatan PAD sebesar Rp.1.000,- akan meningkatkan Belanja Modal sebesar Rp.613,87. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dari hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil analisis ini memiliki kesamaan dengan studi empiris dari Herawati & Lestari (2022), Ishak et

al. (2021), Jumiati et al. (2019), Mundiroh (2019), Mulyani (2016), Rochmatullah & Hartanto (2016), Elni (2016), Fisher & Wassmer (2015).

Ini menunjukkan PAD memiliki tolak ukur memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah, indikator PAD yang mampu memengaruhi Belanja Modal juga dapat dinyatakan sebagai bentuk kemandirian daerah atas pemenuhan kebutuhan pembelanjaan tanpa bantuan penuh dari pemerintah pusat (Herawati & Lestari, 2022). PAD merupakan parameter produktivitas pemda yang inovasinya mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengembangan asset produktif. Untuk meningkatkannya inovasi pengembangan asset produktif tersebut berdampak dalam peningkatan dana yang dialokasikan untuk belanja modal. (Rochmatullah et al., 2016). Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat suatu daerah dan menarik minat investor untuk investasi yang mana akan meningkatkan pendapatan daerah. (Mulyani, 2016)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dianggap konstan.

4.4.5. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pada variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah

terdapat pengaruh dan signifikan secara simultan terhadap variabel Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022. Hal berikut dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ (α) dan nilai f-statistik sebesar $54,18606 > 5,710907$ (F_{tabel}). Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa apabila terjadi perubahan pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2022 sebesar 83,44% yang artinya penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan dari variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten. Penelitian ini memenuhi asumsi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).